

REVITALISASI MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH 3T

Penni Rira ^{*1}

Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

penni.rira01@gmail.com

Riska Reti Sinding

Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

retisinding2001@gmail.com

Abstract

The aims of this research are 1) to find out the nature or meaning of the 3T area, 2) to find out indicators of low quality education in the 3T area, 3) and to find out the strategy for improving the quality of education in the 3T area along with the improvement procedures. By using the qualitative research method of literature study, namely by collecting information from various reading books and literature, it was found that education in the 3T areas or frontier, remote, and underdeveloped areas is currently still low. This condition is caused by various things, one of which is Indonesia's topography which is spread from east to west. An area is said to be a 3T region regulated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 131 of 2015 concerning underdeveloped areas, one of which is the low quality of education. Therefore it is necessary to improve the quality of education so that educational goals can be realized optimally. Efforts to increase this are not only carried out by one party, but by all parties, namely from the center, educational units, to the community.

Keywords: Quality of Education; 3T region.

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui hakekat atau pengertian wilayah 3T, 2) untuk mengetahui indikator rendahnya mutu pendidikan di wilayah 3T, 3) dan untuk mengetahui strategi peningkatan mutu pendidikan di wilayah 3T berikut prosedur peningkatannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku bacaan dan literatur, maka ditemukan hasil bahwa pendidikan di wilayah 3T atau daerah terdepan, terpinggir, dan tertinggal saat ini masih rendah. Kondisi ini diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya topografi Indonesia yang tersebar dari timur sampai barat. Sebuah daerah dikatakan menjadi wilayah 3T diatur dalam Perpres RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang daerah tertinggal, salah satunya ialah mutu pendidikan yang rendah. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tujuan pendidikan bisa terwujud dengan maksimal. Upaya peningkatan ini tak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan oleh semua pihak, yakni dari pusat, satuan pendidikan, hingga masyarakat.

¹ Corresponding author.

Kata Kunci: Mutu Pendidikan; Wilayah 3T.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang pulaunya membentang dari timur ke barat, memberikan sebuah keunikan topografi tersendiri bagi Indonesia. Topografi ini menyebabkan dikenalnya istilah daerah ibukota, pegunungan, pelosok, daerah pesisir, daerah terluar, terpencil, bahkan daerah perbatasan. Masyarakat di wilayah terpencil dan terluar atau di wilayah perbatasan tidak hanya diperhadapkan pada masalah ekonomi, melainkan juga pembangunan yang tidak merata. Hadirnya pembangunan yang tidak merata berimbas pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Sistem pendidikan di wilayah ini, yakni wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat 3T) cukup memprihatinkan. Beberapa masalah yang sering ditemui di wilayah 3T adalah mutu pendidikan yang rendah, sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai, bahkan kualitas kompetensi tenaga pendidik yang rendah. Ketika beberapa aspek di atas tergolong rendah atau 'bermasalah', tentu akan berakibat pada pendidikan itu sendiri.

Pendidikan sebagai salah satu hal yang menjadi penentu taraf dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu bangsa karena pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat sekalipun. Untuk dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, maka dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsa yang harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan dan merata ke semua jenjang pendidikan di manapun. Tak hanya itu, peran pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi salah satu tolok ukur dalam pembaharuan pendidikan (Allo, 2022). Jika melihat latar belakang Indonesia, yang mana Indonesia memiliki tujuan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang disebutkan di atas, namun ketika melihat kembali realitas dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang tidak merata, maka tentu akan berdampak pula pada tujuan pendidikan itu, yang tidak merata.

Problematisa yang dialami Indonesia di bidang pendidikan ini bukanlah masalah sepele yang tidak perlu dikaji lebih lanjut. Setidaknya pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemerataan mutu pendidikan pada berbagai daerah bisa terjadi. Harapan agar mutu pendidikan bisa merata ke semua daerah menjadi dambaan semua masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah 3T.

Beberapa penyebab ketidakmerataan mutu pendidikan di Indonesia ialah karena faktor geografis Indonesia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya masalah ini. Menurut Haleluddin (2019: 42) menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah menjajaki era modern, yakni era revolusi industri, yang dampak positifnya bisa kita rasakan berupa perkembangan sistem digital dan kecerdasan yang mumpuni pada masyarakat penggunaanya. Walaupun dunia bahkan Indonesia telah menginjakkan kaki ke era industri 4.0, yang masyarakatnya menjadi konsumen *internet of thinking* (IT), namun IT ialah hal yang riskan atau masih

tabuh di telinga masyarakat di wilayah 3T. Dalam menghadapi era industri 4.0, perlu untuk menyiapkan pendidikan bagi generasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Namun sayangnya ketidakmerataan mutu pendidikan di semua daerah menjadi salah satu penghalang akan harapan tersebut. Karena itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu direvitalisasi, termasuk peran guru, agar peningkatan mutu pendidikan bisa terjadi, dan dari dalamnya tersedia generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif (Sugiarto, 2015). Studi kepustakaan sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mana datanya bersumber dari buku-buku, dan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan serta dipublikasikan sebelumnya, yang dilakukan dengan membaca, mencatat, serta mengolah dan menganalisisnya sebagai bahan penelitian (Zedd, 2003). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah dari berbagai bacaan atau literatur dan naskah-naskah teks sebelumnya, seperti buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan topik kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahap, yakni *editing* yaitu memeriksa kembali data yang sudah dikumpulkan yang ditinjau dari segi kelengkapan data, kejelasan makna antara satu data dengan data lainnya, kemudian *organizing* yakni mengorganisir atau mengelompokkan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan *finding* yakni melakukan analisis data lanjutan terhadap hasil data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori serta metode yang sudah ditentukan agar didapatkan kesimpulan yang baik, yang isinya merupakan jawaban atas rumusan masalah (Yaniawati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wilayah 3T

Wilayah 3T adalah singkatan dari daerah terdepan, terpendak, dan tertinggal. Adanya penggolongan wilayah seperti ini dikarenakan sistem pembangunan yang tidak merata. Wilayah yang masih sangat memerlukan bantuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya. Dalam Perpres RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang daerah tertinggal tahun 2015-2019, disebutkan dalam beberapa pasal berikut;

Pasal 1

1. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan tertinggal.

Pasal 2:

1. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
 - a. Perekonomian masyarakat
 - b. Sumber daya manusia
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Kemampuan keuangan daerah
 - e. Aksesibilitas
 - f. Karakteristik daerah(Presiden, 2015)

Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki banyak keterbatasan baik fisik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan. Kondisi infrastruktur jalan, penerangan, instalasi-instalasi terkait dengan pelayanan publik yang sangat minimal, atau bahkan belum tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara umum masalah yang dihadapi adalah isolasi wilayah, keterbatasan akses masuk maupun ke luar, fasilitas pelayanan publik yang sangat minimal, sehingga masyarakat kurang sejahtera (Sulistiyani & Yuliani, 2019).

Wilayah 3T masih sangat terbatas di sektor pendidikan, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, hal ini berarti bahwa pendidikan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, oleh karena itu setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki arti yang sangat penting dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan (Disdikpora, t.t.). Namun, karena pembangunan yang tidak merata mengakibatkan beberapa wilayah kurang mendapatkan sektor pendidikan yang layak dan hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup anak-anak yang tinggal di daerah 3T. Pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) tentunya berbeda dengan pendidikan yang berada di daerah yang sudah maju, menurut survei kemendikbud yang telah dilakukan mengatakan bahwa pembelajaran di wilayah 3T masih terkendala (Ambarita & Yuniati, 2020).

Daerah tertinggal merupakan unit analisis yang menarik untuk dideskripsikan, mengingat pentingnya daerah tertinggal untuk diangkat ke permukaan sehingga mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten dengan karakteristik wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan daerah tertinggal menurut regulasi yang sah.

Kriteria daerah tertinggal diatur dalam keputusan menteri PDT nomor 001/KEP/M-PDT/1/2005 terdiri atas 6 kriteria yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Sumber Daya Manusia.
- c. Infrastruktur
- d. Kapasitas Daerah
- e. Aksesibilitas
- f. Karakteristik Daerah(Sulistiyani & Nursam, 2019)

Selain itu, terjadinya kesenjangan di suatu daerah yang menyebabkan daerah tersebut tergolong menjadi wilayah 3T disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Faktor sumber daya manusia.
2. Faktor infrastruktur, mengangkut sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dan hal yang tidak kalah penting juga ialah akses menuju sekolah sangat penting untuk diperhatikan karena jika akses menuju sekolah bermasalah maka akan menghambat penyaluran bantuan dari pemerintah Daerah karena lokasi sekolah yang sulit untuk dijangkau.
3. Faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jika dilihat dalam UU nomor 14 Tahun 2005 mengenai hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapat promosi dan penghargaan, mendapatkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi.
4. Faktor pembelajaran yang konvensional, masih banyak sekolah yang menjalankan pendidikan dengan berbagai keterbatasan yang ada karena dipengaruhi oleh ketersediaan dana, sarana prasarana, hingga guru yang kurang memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.
5. Jumlah buku yang belum memadai, seperti yang diketahui bahwa buku merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, dengan adanya banyak buku membuat wawasan siswa akan semakin berkembang dan dapat menunjang keberhasilan suatu pendidikan.
6. Banyaknya konflik yang terjadi di berbagai wilayah, akhir-akhir ini bangsa Indonesia bergumul dengan berbagai konflik, konflik yang dilatar belakangi agama, ras, suku bahkan ada konflik yang diakibatkan karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial bahkan masalah politik. Sehingga menghambat pembangunan sehingga tertinggal dari daerah non konflik.
7. Lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional.
8. Anggaran yang dimiliki masih terbatas.
9. Pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah (Ahmad Syafi, 2020)

Indikator Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Rendahnya mutu pendidikan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Bahkan tidak jarang hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Orang tua berharap banyak kepada sekolah untuk sekolah lebih berperan untuk meningkatkan kualitas prestasi, mengembangkan potensi, kemampuan anak mereka agar menjadi anak yang berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Orang tua selalu

mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya (Novita, 2017).

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengolahan atau manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang relevan dan berkualitas dapat tercapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh *stakeholder* pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah atau lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tetap menarik perhatian dari orang-orang yang menuntut ilmu dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya (Fadhli, 2017).

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Suryadi dan Tilaar (1994) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Dengan terpenuhinya mutu pendidikan maka terpenuhi juga harapan pelayanan yang memuaskan bagi orang tua dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. (Saputro dkk., 2022) Indikator mutu pendidikan harus memenuhi indikator pendidikan yang bermutu dilihat dari output lembaga pendidikan tersebut. Terdapat setidaknya tujuh indikator atau faktor yang menyebabkan suatu mutu pendidikan menjadi rendah, yang dari masalah itu menyebabkan wilayah nya tergolong ke dalam wilayah 3T.

1. **Sarana Prasarana yang rendah.** Beberapa contoh di antaranya ialah banyaknya gedung sekolah dan fasilitas sekolah yang tidak layak pakai, penggunaan fasilitas pendidikan yang tidak mencukupi, buku perpustakaan yang tidak memadai.
2. **Kualitas guru rendah.** Yang dimaksud dalam hal ini ialah tingkat profesionalisme guru yang kurang maksimal sehingga hanya mampu mengajar tapi tidak mumpuni dalam mendidik.
3. **Prestasi siswa rendah.** Lemahnya sarana prasarana dan kualitas guru menyebabkan minat belajar siswa rendah, yang berdampak pada prestasi siswa rendah.
4. **Kurangnya pemerataan pendidikan ke semua daerah** (Zulkarnaen & Handoyo, 2019)

Dalam konteks pendidikan nasional, beberapa indikator mutu yang disebutkan di atas diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yaitu: standar isi standar kompetensi lulusan, standar proses standar pembiayaan, standar pengelolaan standar pendidik tenaga kependidikan standar sarana prasarana standar penilaian pendidikan (Saputro dkk., 2022). Di samping itu untuk kita mengetahui atau mengukur pendidikan yang berkualitas dan bermutu tentunya diperlukan kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Harus memiliki nilai-nilai moral atau karakter yang tinggi

2. Siswa memiliki nilai ujian yang baik
3. Diperlukan dukungan orang tua, lingkungan sekitar dan masyarakat
4. Sumber daya berlimpah
5. Mengenal dunia modern dengan baik
6. Memiliki tujuan dan visi yang kuat
7. Memperdulikan dan memberikan perhatian kepada siswa
8. Kurikulum yang relevan dan seimbang

Prosedur Peningkatan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T

Pendidikan berikut penyelenggaraannya perlu dikelola dengan baik agar kualitas peserta didik meningkat yang akan berdampak positif pada pembangunan nasional. Pengelolaan pendidikan termasuk mutu pendidikan bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan juga dibantu oleh masyarakat, lembaga dan satuan pendidikan. Pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah 3T dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat dalam pelayanan pendidikan agar merata, mencukupi, bermutu, terjangkau, berdaya saing, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya ada enam alur atau prosedur peningkatan mutu pendidikan yang perlu dilakukan, yakni:

1. **Mengidentifikasi permasalahan anak.** Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kemendikbudristek memberikan tujuh poin kapan sebuah pendidikan dikatakan dan digolongkan menjadi bagian dari wilayah 3T. Adapun ketujuh poin tersebut ialah sebagai berikut;
 - a) Belum tersedianya layanan pendidikan, yaitu kondisi dimana siswa kesulitan mendapatkan informasi layanan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.
 - b) Minimnya akses layanan pendidikan yang biasanya disebabkan oleh letak daerah yang terpencil dan jauh dari pusat, sehingga distribusi layanan pendidikan menjadi tidak merata.
 - c) Tenaga pendidik dan kependidikan yang minim.
 - d) Distribusi guru yang tidak seimbang
 - e) Tidak sesuainya antara kebutuhan dan penyediaan guru. Jumlah guru bukanlah satu-satunya yang menjadi permasalahan, melainkan juga mutu guru. Tak jarang dijumpai guru hanya masuk kelas, membuka dan membaca buku. Padahal tugas seorang guru haruslah sesuai dengan kebutuhan siswa, yakni guru harus mampu mendidik dan mengajar.
 - f) Angka partisipasi sekolah yang rendah. Meskipun program pendidikan Indonesia Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang mewajibkan semua peserta didik menempuh pendidikan minimal sembilan tahun, namun tak sedikit dijumpai banyak siswa yang putus sekolah. Persoalan ini banyak dijumpai di wilayah 3T.
 - g) Kualitas sarana prasarana yang kurang memadai. (Syarifuddin dkk., 2021)

2. **Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak.** Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada bagian ini di antaranya ialah:
 - a) Pemenuhan kompetensi dasar
 - b) Memberikan pengetahuan mengenai potensi sumber daya
 - c) Memberikan keterampilan hidup dan kemampuan organisasi, komunikasi, manajemen, kerja sama, dll.
 - d) Menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam
 - e) Memberikan pengajaran karakter dan wawasan kebangsaan
 - f) Membuka dan memudahkan akses layanan pendidikan
 - g) Menyediakan layanan pendidikan formal dan nonformal
3. **Mengidentifikasi sumber daya pendidikan anak**
4. **Merencanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak**
5. **Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak**
6. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan pendidikan anak.** Monitoring dan evaluasi dalam tahap ini didasarkan pada dua prinsip, yakni 1) prinsip transparan, yaitu segala prosesnya terbuka bagi masyarakat, dan 2) prinsip akuntabilitas yaitu prinsip untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan (Rustad, 2013)

Strategi Merevitalisasi Pendidikan di Wilayah 3T

Dalam upaya meningkatkan dan merevitalisasi mutu pendidikan di wilayah 3T, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut.

1. Segala upaya dirancang dan dilakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi setempat
2. Secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah (*problem solving*)
3. Materi atau strategi yang dirancang sedapat mungkin berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan peserta didik
4. Desain kegiatan dimodifikasi sedemikian rupa agar fleksibel, yaitu dapat disesuaikan berdasarkan dinamika sosial (Abdulmuid, 2013)

Pelaksanaan revitalisasi atau peningkatan mutu pendidikan tak hanya dilakukan oleh satu pihak atau lembaga saja, melainkan semua pihak.

a. Peran satuan pendidikan

- 1) Membentuk kerjasama terhadap satu pihak dengan pihak lainnya
- 2) Melakukan pembinaan kepada peserta didik
- 3) Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Mendukung proses pembelajaran

b. Peran lembaga pendidikan

- 1) Menerapkan model pembelajaran yang dikondisikan dengan keadaan lokal
- 2) Menerapkan konsep asimilasi dalam pembelajaran, yakni siswa mencoba hal baru berdasar pada pengetahuan yang telah dimilikinya

- 3) Menerapkan konsep akomodasi dalam pembelajaran, yakni siswa memperluas pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman mereka
- 4) Guru harus memberikan dukungan melalui kerjasama antarguru, dan kerjasama guru-orang tua-masyarakat
- 5) Guru perlu berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pelajaran
- 6) Guru perlu mumpuni dalam penggunaan teknologi

c. Peran masyarakat

- 1) Mengawasi perkembangan dan proses pembelajaran anak di rumah
- 2) Menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan anak
- 3) Memberikan *feedback* kepada sekolah mengenai pelaksanaan pendidikan
- 4) Memberikan usul dan saran untuk perbaikan pendidikan di sekolah (Syarifuddin dkk., 2021)

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang dari timur ke barat memungkinkan terjadinya berbagai masalah dan ketidakmerataan layanan, salah satunya layanan pendidikan. Ketidakmerataan layanan pendidikan ini khususnya di wilayah 3T (wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal) berdampak pada tidak terpenuhinya dan terlaksananya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan pun perlu ditingkatkan. Pelaksanaan upaya ini perlu didukung oleh semua lembaga, mulai dari pusat, satuan pendidikan, bahkan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdumuid, M. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit Pengging Mangkunegaraan.
- Ahmad Syafi. (2020). *Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)*. Penerbit Laksita Indonesia.
- Allo, W. B. (2022). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Apokalupsis*, 13(1), 19–39.
- Ambarita, J., & Yuniati, E. (2020). *PAK dan Covid-19 Problematika Pembelajaran PAK Daerah Tertinggal*. Penerbit Adab.
- Disdikpora. (t.t.). *Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang*. <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 2.
- Novita, L. (2017). Indikator Mutu Sekolah Menurut Prespektif OrangTua Siswa Di SMP Negeri 2 Bantul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi* 6, 2, 2.
- Presiden, P. (2015). *PerPres RI Nomor 131 tahun 2015-2019 Tentang Daerah Tertinggal*. Peraturan Presiden.
- Rustad, S. (2013). *Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal: Menempa Diri Demi Ibu Pertiwi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Saputro, A. N. C., Kuswandi, S., & Pu, S. (2022). *Manajemen Mutu Terpadu Untuk Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (T. D. S. Media, Ed.; Pertama). Suaka Media.
- Sulistiyan, A. T., & Nursam. (2019). *Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Daerah Tertinggal*. Kementerian Desa PDT Transmigrasi.
- Sulistiyan, A. T., & Yuliani, K. (2019). *Potensi Lokasi dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao dan Alor*. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Syarifuddin, M. A., Mardianto, A., & Maknun, J. (2021). *Pendidikan Bagi Anak di Daerah 3T* (1 ed.). Direktorat Sekolah Dasar - Kemendikbudristek.
- Yaniawati, R. P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)* (Penyamaan). Lingkungan Dosen FKIP Unpas.
- Zedd, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnaen, & Handoyo, A. D. (2019). Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 1(20–23).